

FUNGSI PENGKOORDINASIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN KOTA SAMARINDA

Muhammad Khairul Anwar ¹

Abstrak

Muhammad Khairul Anwar. *Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda, dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Bapak Dr. Bambang Irawan, M.Si.*

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda, yang terletak di Jalan Dahlian Nomor 81 Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik yang digunakan oleh penulis adalah purposive sampling, Narasumber berasal dari pejabat yang terkait dalam penelitian ini antara lain Kepala BAPPEDA Kota Samarinda, Sekretariat BAPPEDA, dan Kepala Bidang Perencanaan Program, dengan analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles, Huberman, dan Johnny.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa BAPPEDA Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda sesuai dengan instruksi dari Kepala Daerah yang menjabat, dan berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di Kota Samarinda yaitu membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (1 tahun).

BAPPEDA Kota Samarinda juga berfungsi menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan yang terdapat di Kota Samarinda dalam perencanaan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pengkoordinasian dilakukan melalui rapat koordinasi, Forum Group Discussion (FGD) dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan SKPD dan Dinas-dinas yang terkait dalam perencanaan pembangunan hal ini dilakukan untuk melakukan program-program prioritas yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD Kota Samarinda

Kata Kunci : Fungsi Penyelenggaraan pengkoordinasian BAPPEDA

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: anwarmuhammad447@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan yaitu melalui perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah baik di pusat maupun di daerah pedesaan dimana pemerintah saat ini memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah untuk memacu daerah pembangunan yang masih tertinggal. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA pada daerah tingkat I dan daerah tingkat II diseluruh tanah air. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPEDA mempunyai peranan yang penting didalam melaksanakan perencanaan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah, Pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS sudah mengeluarkan surat edaran tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam surat edaran tersebut Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM/D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Dalam pelaksanaannya, BAPPEDA melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat kompleks dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, artinya semua bidang perencanaan pembangunan ditangani dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Samarinda BAPPEDA Kota Samarinda berkoordinasi dengan SKPD yang terkait salah satunya seperti Dinas Cipta Karya dalam pelaksanaan tata ruang kota dan prasarana perkotaan. BAPPEDA juga berkoordinasi dengan camat dalam pelaksanaan pembangunan desa dimana BAPPEDA memberikan usulan perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui Musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrenbang). Dalam hal ini BAPPEDA Kota Samarinda sebagaimana melaksanakan tupoksi perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencakup tentang perumusan kebijakan, pemberian dukungan, pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian, serta pelaksanaan monitoring. BAPPEDA Kota Samarinda dituntut untuk mampu secara optimal dan tetap konsisten membangun perencanaan daerah guna mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku pembangunan serta mampu merumuskan dokumen yang operasional dan sistematis guna mendorong pembangunan daerah di Kota Samarinda.

Yang menjadi masalah BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Samarinda secara umum adalah adanya miskordinasai antara SKPD yang terkait. Koordinasi yang kurang maksimal dalam pengumpulan data dan informasi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Permasalahan ini juga disebabkan adanya keingan yang lebih dari SKPD yang terkait yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah dibuat oleh BAPPEDA. BAPPEDA juga merasa kesulitan karena minimnya kesadaran SKPD dalam pengelolaan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun alternatif-alternatif program pembangunan prioritas di Kota Samarinda. Dalam hal ini diindikasikan dengan keterlambatan data dan informasi pendukung dari SKPD yang terkait kepada BAPPEDA dan penekanan terhadap program kegiatan pada RPJMD tidak diikuti sampai tuntas yang menyebabkan permasalahan untuk merencanakan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti fungsi BAPPEDA dan perencanaan pembangunan Kota Samarinda dengan judul “Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk mencoba mencari jalan keluar atau solusi dari suatu persoalan, karena adanya hal-hal yang dirasa meragukan atau kurang meyakinkan.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana fungsi pengkordinasian BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Samarinda?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam pengkoordinasian pesencanaan pembangunan di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Tanpa adanya suatu tujuan yang akan dicapai, penelitian akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, tujuan penelitian dapat dikatakan sebagai suatu sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi pengkoordinasian BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan di Kota Samarinda.

Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi pihak yang memerlukan dalam rangka mengembangkan usaha-usaha atau tugas kearah yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kegunaan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Sebagai sumber informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian mengenai fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kota.
2. Kegunaan Praktis
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan khususnya aperatur pelaksana dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

KERANGKA DASAR TEORI

Koordinasi

Manajemen pemerintahan modern didasarkan atas prinsip spesialisasi atau pembagian kerja. Jabatan-jabatan diuraikan dalam tugas-tugas berulang satu persatu dan dipercayakan kepada individu-individu baik bekerja dalam bagian yang sama maupun yang bekerja dalam bagian-bagian pemerintahan yang berlainan. Akan tetapi hanya dengan penerapan spesialisasi saja tidak memungkinkan suatu organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena jabatan-jabatan dikhususkan dan dibagikan diantara unit-unit maka koordinasi adalah perlu.

Menurut Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama.

Handyaningrat (2000:124) juga mengemukakan tentang adanya ciri-ciri dalam koordinasi sebagai berikut:

1. Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan.
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama.
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus.
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.
5. Konsep kesatuan tindakan.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

Sedangkan menurut E.F.L. Brech (Hasibuan, 2007:85) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga kegiatan agar kegiatan

itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Hasibuan juga menyatakan (2001:86) bahwa koordinasi itu penting dalam suatu organisasi yaitu:

1. Untuk mencegah kekacauan, percecokan, dan kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsure manajemen dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.

Dalam koordinasi adanya alat yang digunakan hal ini disampaikan menurut Ndraha (2000:123) bahwa koordinasi dilakukan melalui dengan menggunakan alat seperti:

1. Rapat-rapat koordinasi.
2. Permintaan data/informasi/pendapat dari instansi.
3. Konsultasi.
4. Seminar/lokal karya dan lain-lain.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siap yang akan mealakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efesien dan efektif yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

A. Pengertian Perencanaan

Dalam buku perencanaan pembangunan daerah Ginanjar Kartasasmita (1997:48) menyatakan pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:67) perencanaan yang dianggap sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan baik maka manfaat perencanaan adalah :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forcasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkemangan, juga

- mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau memilih kombinasi cara yang terbaik.
 4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran dan kegiatan usahanya.
 5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

B. Pengertian Pembangunan

Menurut Korten (1993:162) pembangunan adalah proses dengan anggota-anggota suatu masyarakatnya meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya dalam upaya menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Sedangkan menurut Khairuddin (1994:24) pembangunan mengandung unsur-unsur usaha atau proses, peningkatan, kemajuan, atau perubahan kearah kemajuan, berkesinambungan, dilakukan secara sadar atau dengan sengaja, terencana, untuk tujuan pembinaan, dan dilakukan secara bertahap.

C. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Dalam konteks manajemen, menurut kartasasmita (1997:169) perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok yang harus diemban. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Bintoro Tjokroamidjojo (1984:74) memberikan definisi perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Organisasi bukanlah sesuatu yang kongkrit, karena organisasi tidak berwujud. Agar organisasi lebih kongkrit, organisasi perlu diberi nama sesuai dengan jenis kegiatan dan tujuan yang akan dicapai, salah satunya yaitu BAPPEDA.

Mills dan Mills (2000:58) dalam buku Dasar-Dasar Organisasi mendefinisikan organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam buku yang sama mengatakan adapun karakteristik utama dari organisasi dapat diringkas sebagai 3-P, yaitu: *Purposes*, *People*, dan *Plan*

(Gerloff, 1985:6). Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak mempunyai tujuan (*Purposes*), anggota (*People*), dan rencana (*Plan*). Dalam aspek rencana terkandung semua ciri lainnya, seperti sistem, struktur, desain, strategis, dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur manusia (*People*) dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Bappeda adalah badan perencanaan dan pembangunan daerah dibentuk pada tahun 1980 melalui Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980. Bappeda memiliki badan atau tupoksi susunan dan struktur organisasi didalamnya. Diantaranya adalah tupoksi kepala badan, tupoksi seketariat, tupoksi bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial dan budaya, dan bidang penelitian pengembangan pendapatan dan pelaporan, lalu bidang penanaman modal.

B. Aspek Strategis Organisasi

Menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

C. Tugas BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumberdaya manusia, perencanaan pemerintah dan aparatur serta perencanaan perekonomian.

D. Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Tahun 2014, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi dan statistik, perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan sumberdaya manusia, perencanaan pemerintahan dan aparatur serta perencanaan perekonomian;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan;

E. Visi BAPPEDA

Dalam visi BAPPEDA yang mengacu pada Rencana Startegis (Renstra) BAPPEDA Kota Samarinda tahun 2011-2015, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi BAPPEDA yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2011-2015. Adapun visi BAPPEDA Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah yaitu "*Terwujudnya Sinergisitas Perencanaan Kota Samarinda 2015*".

F. Misi BAPPEDA

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi BAPPEDA Kota Samarinda tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang mengarah ke profesionalisme dibidang perencanaan.
2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Menciptakan koordinasi yang serasi dan terpadu.
4. Menciptakan sistem jaringan perencanaan kota yang sistematis.
Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajiaan potensi ekonomi.

G. Struktur Organisasi BAPPEDA

Organisasi bukanlah sesuatu yang kongkrit, karena organisasi tidak berwujud. Agar organisasi lebih kongkrit, organisasi perlu diberi nama sesuai dengan jenis kegiatan dan tujuan yang akan dicapai. Akan tetapi, meski organisasi sudah diberi nama, kebanyakan orang melihat organisasi dari segi bangunan atau gedung sebagai tempat orang-orang melakukan kegiatan organisasi. Agar orang-orang melihat organisasi tidak hanya dari segi gedungnya, maka organisasi harus mempunyai struktur.

Dalam buku dasar-dasar ilmu organisasi GR Terry (1960:109) mengatakan suatu bagan atau skema organisasi adalah suatu gambaran grafis dari struktur organisasi.

Menurut Sutarto (1984:109) bagan organisasi adalah gambaran struktur organisasi yang ditunjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukan yang masing-masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai struktur organisasi, menurut susunan organisasinya :

1. Kepala BAPPEDA
2. Sekretaris
3. Bidang Evaluasi dan Statistik
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
5. Bidang Perencanaan SDM
6. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
7. Bidang Perencanaan Ekonomi

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan, maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yang juga merupakan batasan terhadap penelitian skripsi yang dilakukan yaitu :

“Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan Kota Samarinda adalah suatu organisasi yang merupakan sebuah lembaga atau instansi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai organisasi yang

melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai suatu pembangunan yang adil dan merata”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan variabel yang diteliti, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan : Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi dilapangan. Sehingga mendapat fokus penelitian: Fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Kota Samarinda: Pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan perencanaan daerah, pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan serta kendala yang dialami oleh BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Kota Samarinda.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berperan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti dapat membatasi studi dalam penelitiannya dan mampu memenuhi kriteria suatu informasi dilapangan sehingga dapat mengetahui data yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkannya yang kemudian diolah hingga menjadi suatu kesimpulan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda nomor 31 tahun 2014 dan merupakan staf dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, maka fokus penelitian adalah:

1. Fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Kota Samarinda yaitu:
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan badan.
2. Kendala yang dialami oleh BAPPEDA dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan Kota Samarinda.

Sumber Data

Data dari sudut ilmu sistem informasi adalah fakta dan angka yang relatif belum dapat dimanfaatkan terlebih dahulu. (Mc. Loed, 1995 dalam Umar, 2004:63). Oleh karena itu, data harus ditransformasikan terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan informasi bagi peneliti.

Sumber data diperoleh dari data base yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini penulis

mengumpulkan data berdasarkan sumbernya yang terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sumber data primer diperoleh langsung dengan *key informan* yaitu pihak-pihak yang memiliki jabatan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah ketua BAPPEDA, dan *informan* sekretaris BAPPEDA, dan staf instansi bidang yang ada di BAPPEDA.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder meliputi berbagai informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip yang dikemas dalam bentuk table, grafik, diagram gambar, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui *teknik purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96). Pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap mengerti dan tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Jhonny (Saldana 2014:31-33), yang terdiri dari 3 alur, berikut penjelasannya : Kondensi Data yaitu merujuk pada proses memilih, menyederhanakan mengabstarkkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan dari bagian catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya, penyajian data secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian yang dimaksud meliputi banyak tipe dari matriks, grafik, kurva, dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis dimana penyajian disarankan akan berguna, pengambilan keputusan

atau verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan; atau dapat pula tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan review dari untuk membangun atau dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda berdomisili di Jalan Dahlia No. 81 Samarinda Telp: 0541-203785, Fax: 0541-732072 dan dibentuk berdasarkan kepada KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 31 Tahun 2014, BAPPEDA Kota Samarinda merupakan: Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah, dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi pengkoordinasian BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Samarinda, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Samarinda. Maka penulis melakukan wawancara kepada key-informan dan informan dalam rangka mengumpulkan data primer terkait dengan penyelenggaraan pengkoordinasian di Kantor BAPPEDA Samarinda yang menjadi obyek utama penelitian ini. Dalam penelitian ini penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dan kendala BAPPEDA dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan telah terurai pada sub bab fokus penelitian. Berikut ini adalah sajian hasil penelitian penulis mengenai hal tersebut:

Pengkoordinasian Penyelenggaran Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Mills dan Mills (2000:58) dalam buku dasar-dasar organisasi mendefinisikan organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimaksud organisasi disini adalah BAPPEDA melakukan fungsinya yaitu penyelenggaraan pengkoordinasian dengan berbagai SKPD dan Dinas-dinas yang terkait yang terkait hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa didalam penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA berkoordinasi dengan salah satu SKPD yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam mekanismenya sudah tertuang pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25

Tahun 2013 yang dimana BAPPEDA sebagai penunjang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan Dinas Cipta Karya sebagai pelaksana pembangunan. Dalam penyelenggaraan pengkoordinasian yang dilakukan Dinas Cipta Karya terhadap BAPPEDA melakukan proyek pembangunan rumah untuk merelokasi warga yang berada di daerah Sungai Karang Mumus, dalam hal ini BAPPEDA sebagai penunjang terlaksananya proyek relokasi pembangunan perumahan yaitu melalui anggaran yang diberikan untuk pembangunan proyek relokasi perumahan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota sebagai pelaksanaan proyek pembangunan perumahan. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota juga melakukan verifikasi data warga yang berada dalam bantaran Sungai Karang Mumus untuk dipindahkan.

Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kesekretariatan Badan

Manajemen pemerintahan modern didasarkan atas prinsip spesialisasi atau pembagian kerja. Jabatan-jabatan diuraikan dalam tugas-tugas berulang satu persatu dan dipercayakan kepada individu-individu baik bekerja dalam bagian yang sama maupun yang bekerja dalam bagian-bagian pemerintahan yang berlainan. Akan tetapi hanya dengan penerapan spesialisasi saja tidak memungkinkan suatu organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena jabatan-jabatan dikhususkan dan dibagikan diantara unit-unit maka koordinasi adalah perlu.

Dalam koordinasi adanya alat yang digunakan hal ini disampaikan menurut Ndraha (2000:123) bahwa koordinasi dilakukan melalui, dengan menggunakan alat seperti:

1. Rapat-rapat koordinasi
2. Permintaan data/informasi/pendapat dari instansi
3. Konsultasi
4. Seminar/lokal karya dan lain-lain

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengkoordinasian penyelenggaraan sekretariat badan yang dilakukan BAPPEDA sesuai dengan tupoksinya bahwa dalam sekretariat BAPPEDA membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan pembangunan dan membantu dalam pelaksanaan pengkoordinasian kepada SKPD dan Dinas-dinas yang terkait. Bentuk pengkoordinasian yang dilakukan BAPPEDA melalui rapat koordinasi dengan SKPD melalui Forum Group Discussion (FGD) untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dilapangan, melalui data yang didapat dari SKPD, melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), serta melalui konsultasi publik yang dilakukan sekretariat BAPPEDA. Didalam pelaksanaan pengkoordinasian yang dilakukan sekretariat badan mempunyai tujuan yaitu agar bisa mencegah konflik yang terjadi antar BAPPEDA dan SKPD, mencegah agar tidak terjadinya perselisihan dalam pengumpulan data, dan mencegah terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan pengkoordinasian yang dilakukan BAPPEDA dengan semua sub bidang yang ada di BAPPEDA maupun yang ada di SKPD.

Kendala BAPPEDA Dalam Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan melalui wawancara dalam pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah BAPPEDA sebagai suatu organisasi tentunya mempunyai masalah atau kendala yang dihadapi BAPPEDA. Dalam hal ini sesuai dengan penyelenggaraan pengkoordinasian yang dilakukan BAPPEDA dengan melibatkan SKPD dan Dinas-dinas yang terkait dengan melalui koordinasi yaitu rapat koordinasi yang dilakukan antar SKPD, juga melalui *Forum Group Discussion* (FGD), serta melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Dalam pelaksanaannya adanya perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang dilakukan SKPD maupun Dinas-dinas yang terkait hal ini akan mempersulit pengkoordinasian yang dilakukan BAPPEDA, dalam pelaksanaan rapat koordinasi antar SKPD adanya keterlambatan SKPD dalam pengumpulan data dan informasi, juga ketidakseragaman data yang diperlukan agar BAPPEDA dapat membuat program pembangunan, hal ini disebabkan adanya perbedaan orientasi dalam rapat koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dengan SKPD sehingga hal mengakibatkan keterlambatan dalam pembuatan program pembangunan yang akan datang.

Sesuai dengan pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang dilakukan BAPPEDA dengan melibatkan semua SKPD yang terkait, dalam kendala yang dihadapi ada beberapa hal pokok yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan :

1. Adalah permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan sumber daya, hal ini kurangnya SDM yang tidak merata terutama pada SKPD yang terkait dalam pengumpulan data sehingga menghambat perencanaan pembangunan.
2. Adalah tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan BAPPEDA dengan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) atau rapat koordinasi dengan SKPD guna membahas permasalahan yang terjadi.
3. Penerjemahan dalam program atau kegiatan yang lebih konkrit. Dalam hal ini BAPPEDA melaksanakan musrenbang kepada semua SKPD yang terkait untuk rencana program.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan menyimpulkan uraian-uraian sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan BAPPEDA Kota Samarinda sudah cukup baik dan sesuai dengan tupoksinya yang dimana penyelenggaraan pengkoordinasian melalui rapat koordinasi antar bidang dan SKPD, juga melalui *Forum Group Discussion* (FGD), serta melalui musyawarah rencana pembangunan

- (musrenbang) dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota yang diikuti seluruh SKPD dan Dinas-dinas yang terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan.
2. BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pengkoordinasian kendala yang dihadapi yaitu dengan adanya rapat koordinasi antar SKPD, seringkali keterlambatan dalam hal pengumpulan data dan juga ketidakseragaman data yang mengakibatkan BAPPEDA kesulitan membuat program perencanaan pembangunan yang akan datang.

Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan saran yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi BAPPEDA Kota Samarinda terutama kepada seluruh subbidang BAPPEDA supaya lebih dan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh Dinas-Dinas dan SKPD yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Samarinda. Dengan cara melakukan rapat-rapat kecil atau rapat tersendiri sesuai bidang yang membawai SKPD jadi sehingga ketika ada rapat besar seperti rapat antar SKPD, rapat besar (musrenbang dan FGD) subbidang yang telah membawai SKPD telah siap melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. BAPPEDA Kota Samarinda menanggulangi kendala yang dihadapi dengan cara melakukan evaluasi dan monitoring, serta melakukan sosialisasi dengan langsung kepada seluruh SKPD dan Dinas-Dinas sebelum penyelenggaraan pengkoordinasian agar dalam pelaksanaannya nanti terutama dalam koordinasi melalui rapat koordinasi antar SKPD tidak ada hal dalam perbedaan persepsi atau ketidakseragaman data sehingga BAPPEDA dapat dengan mudah melaksanakan program prioritas yang selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Haryono, Sudriamunawar. 2002. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Ekonomi Pembangunan II*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

- Miles, Matthew B., A Michael Huberman & Jhonny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Pontoh, Nia K., & Iwan Kustiawan. 2008. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Ranupandojo, Heidjrachman. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Safi'I, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Averroes Press.
- Suhendra, K. 2008. *Manajemen Dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Haris Munandar (Ahli Bahasa). Jakarta: Erlangga.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Dokumen-dokumen:**
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2011-2015. *Rencana Startegis (Renstra) Kota Samarinda Tahun 2011-2015*. Samarinda.
- Keputusan Presiden. 1980. *Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Walikota. 2014. *Peraturan Walikota Samarinda No. 31 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda*. Sekretaris Daerah. Samarinda.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Jakarta.

Jumlah halaman

Idealnya 10-12 halaman. Namun bisa ditoleransi sampai 15 halaman (satu spasi, ukuran kertas sesuai format halaman jurnal [dipotong jadi 18x25 cm])

Susunan Hardcopy Yg Diserahkan ke Pembimbing/Prodi

1. Halaman Judul (download di ejournal.pin.or.id)
2. Halaman Persetujuan Penerbitan Artikel eJournal dari Pembimbing (download di ejournal.pin.or.id)
3. Artikel eJournal diprint bolak balik²
4. Kertas pada poin 1-3 dipotong dengan ukuran 18 x 25 cm (ukuran jurnal) lalu distaples/jilid.

Catatan/Keterangan:

1. **Contoh format halaman ini adalah artikel eJournal yang nomor halamannya dimulai dari NOMOR GANJIL** (nomor halaman akan diberikan oleh Prodi atau Bagian/Staf yang ditugaskan). Jika anda mendapatkan nomor halaman mulai dari nomor genap, pakai format halaman ejournal yang satunya lagi (mulai nomor genap). Atau pakai halaman ini, tapi header judul-pengarang dan volume-nomor ditukar (yang di kiri dipindah ke kanan, yang di kanan dipindah ke kiri – yang dikiri mepet ke kiri (align=left), yang di kanan mepet ke kanan (align-right). **Catatan:** perbedaan format halaman mulai dari nomor genap dan nomor ganjil hanya terletak pada header yang bertukar tempat. Footernya (nomor urut halaman di pojok kanan dan kiri bawah tetap atau akan menyesuaikan secara otomatis).
2. **Header di halaman depan disesuaikan dengan artikel anda**

² Untuk Artikel yang mulai dari nomor Genap, halaman depan diprint di satu muka kertas saja (halaman di baliknya kosong). Setelah halaman depan ini baru diprint bolak-balik (Lihat di file 2_format_artikel_mulai_hlm_genap.doc).

Baris pertama: 2013, 1(1):1-11 -> artinya terbit thn 2013, volume 1 (nomor 1), hlm 1-11

Baris kedua: ISSN 0000-000 -> artinya ISSN akan dilengkapi kemudian. ISSN akan diusulkan jika jumlah artikel untuk satu nomor sudah lengkap.

3. **Judul di header diringkas sendiri dalam satu baris. Nama yang panjang juga bisa diringkas.**
4. **Volume, Nomor, Bulan Tahun, halaman baru diisi setelah mendapatkan infonya dari Prodi atau Bagian/staf yang ditugaskan.**
5. **Info Volume, Nomor, dan (mulai nomor) Halaman akan diberikan setelah artikel ejournal mendapat persetujuan dari Pembimbing I dan II.**

Tips mengganti header

(judul & pengarang ringkas, volume, nomor, dsb di pojok kiri atau kanan atas)

OFFICE WORD 2003, 2007

1. Klik header, lalu ketik judul, nama pengarang, volume, nomor, dsb
2. Jika melakukan copy paste di header, pastikan formatnya tidak berubah (ada garis pemisah di bawah judul-pengarang dan volume-nomor-hlm. Jika format berubah atau garis bawah hilang, copy teks/judul dan paste di Notepad atau Wordpad (Programs-Accessories-Notepad atau Wordpad). Lalu copy-paste di header.

Tips mengganti nomor urut halaman:

(misalnya anda mendapat nomor halaman mulai nomor 37)

OFFICE WORD 2003

1. Klik nomor halaman di pojok kanan atau kiri bawah (nomor yg mana saja)
2. Klik Format Page Number
3. Di "Start at", ketik angka 37 (maka semua nomor halaman akan berubah mengikuti nomor 37ini).

OFFICE WORD 2007

1. Soroti salah satu nomor halaman (mis. halaman 12) dengan pointer mouse, lalu klik kanan, klik Edit Footer
2. Di menu Page Number, klik tanda panah ke bawah, klik Format Page Number
3. Masukkan Start at : 37

Tips Menjilid Dan Mengecek Apakah Anda Memakai Format Halaman Yang Benar (Mulai Nomor Ganjil Atau Genap)

1. Print artikel jurnal bolak balik dalam satu halaman. Format halaman ini didisain dengan Printer LaserJet 1020. Jika anda memakai printer ini untuk ngeprint, maka anda tidak perlu lagi menyesuaikan marginnya.
2. Potong kertasnya dengan ukuran 18 x 25 cm.
3. Buka halaman dimana saja. Jika header **kiri atas** berisi nama jurnal dan nomor terbitan dan di **kanan atas** berisi judul ringkas dan pengarang, berarti anda memakai format artikel dengan benar. Jika terbalik, berarti anda memakai format halaman yang salah.

Tips Membuat File PDF

File PDF yang bagus adalah file yang memakai ukuran sesuai ukuran kertas. Ukuran kertas ejournal adalah 18 x 25. Jika anda menconvert biasa tanpa melakukan setting tambahan maka file anda akan diconvert ke ukuran kertas kwarto. Cara mengubah file doc agar sesuai dengan ukuran kertas adalah sbb:

1. Pakai/install software **Adobe (Acrobat) Distiller**.
2. Buka file Word yang akan diubah ke PDF.
3. Klik File, lalu Print.
4. Di Printer name, pilih Acrobat Distiller. Di pojok kanan bawah ada settingan **Scale to Paper Size**, lalu pilih **PostScript Custom Page** (pilihan paling bawah).
5. Klik OK.

Catatan: Jika anda memakai software lain spt Win2PDF dsb, cari settingannya yang sesuai di Scale to Paper Size atau menu lainnya.